

**KEDUDUKAN DAN PERAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014**

(Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa)



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**Yudianto**  
**NIM: 10500112078**

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2016**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri , bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat pada skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan pada kode etik ilmiah.

Gowa, 29 Februari 2016



Yudianto  
Nim: 10500112078

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “ Kedudukan dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ( Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa )”, yang di susun oleh saudara Yudianto, NIM: 10500112078, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 21 Maret 2016, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil akhir 1437 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 22 Maret 2016

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Halim Talli, M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Jumadi, SH., MH	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Marilang, SH., M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Andi Satriani, SH., MH	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN

Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum,  
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-12
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	13-37
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan.....	13
B. Tinjauan Umum Otonomi Daerah.....	25
C. Teori Kewenangan.....	31
D. Teori Partisipasi.....	34
E. Teori Kepemimpinan.....	35
F. Kerangka Konseptual.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38-41
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	38

B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data .....	39
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	41
G. Pengujian Keabsahan Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42-66</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Pallangga.....	42
B. Kedudukan Dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.....	46
C. Faktor Yang Mempengaruhi Kepemimpinan Camat Dalam Pelaksanaan Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67-68</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Implikasi Penelitian.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Hidayah, Karunia serta izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ **Kedudukan Dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa )**” sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam tak lupa penulis hanturkan kepada Nabi yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Rampungnya skripsi ini, penulis mempersembahkan untuk orang tua tercinta ayahanda **Muh Jufri Dg Bani** dan Ibunda tercinta **Mustaina Dg Ti’no** yang tak pernah bosan dan tetap sabar mendidik, membesarkan, member dukungan, memberi semangat serta senantiasa mendoakan penulis, “**You’re the Best motivator**” .Terimakasih kepada sahabat saya **Muh. Nursyam. Amd. Kem,** dan **Munawir Kadir** yang selalu bersedia ketika penulis meminta bantuan.

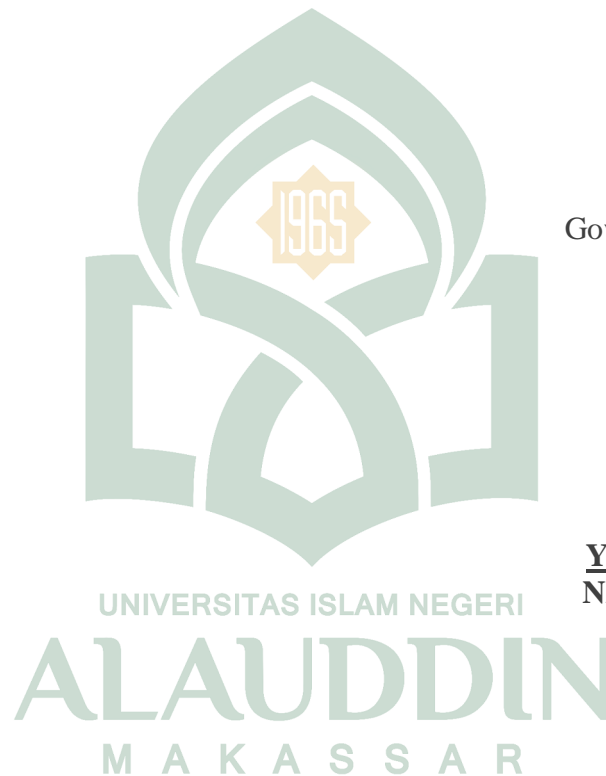
1. Teruntuk Bapak **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar,
2. Teruntuk Bapak **Prof. Dr. Darussalam, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak **Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag**, selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan pengembangan lembaga, **Bapak Dr. Hamsir, SH.,M.Hum** selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, **Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag**, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Segenap Pegawai Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Teruntuk Ibu **Istiqamah, SH., M.H** selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak **Rahman Syamsuddin, SH., M.H.** selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang selalumemberikanbimbingan, dukungan, Nasehat, motivasi demi kemajuan penulis.

4. Teruntuk Bapak **Dr. Muh Sabir, M.Ag** dan Ibu **Andi Safriani. SH., MH.** Selaku pembimbing skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi, demi kemajuan penulis.
5. Teruntuk Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam penulisan hokum ini dan semoga penulis dapat amalkan dalam kehidupan di masa depan penulis.
6. Teruntuk pemerintah Pemerintah Kecamatan Pallangga serta pihak terkait dalam penulisan ini atas kerjasamanya dalam penulisan skripsi ini.
7. Terima Kasih kepada Sahabat saya **Muh Alwi Hidayat**, dan seluruh teman-teman jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2012 yang selalu menemani dalam Menyelesaikan skripsi ini dan telah memberikan motivasi, semangat serta dukungan kepada saya.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Hukum terkhusus Angkatan 2012 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar :**Syamsul Rijal, Muh Fiqri, Munawir, Dinul, Oci, Nurfadillah, Akil, Lala, Subhan, Ulla, Tami, Bambang, Sukri, Ciwang, Susi, Irwan Asmin, Angga. SH, Kadir, Mihrum, Nova, Ayu, Rahmat Tobo, Qurais, Irvan Syafar, Khalik, Jasman.** Dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah menambah pengalaman dan cerita dalam hidup dan akan selalu menjadi kenangan.
9. Teman-teman **KKN PROFESI UIN** Alauddin Makassar Angkatan VI tahun 2015 di Kementerian Agama Kabupaten Gowa yang selalu saling menyemangati satu sama lain dalam hal penyelesaian Study.

10. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini baik secara materil maupun formil.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hokum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.



Gowa, 29 Februari 2016

Penulis

**Yudianto**  
**NIM : 10500112078**



## ABSTRAK

**Nama : Yudianto**

**Nim : 10500112078**

**Judul : Kedudukan dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa)**

---

Pokok masalah penelitian ini adalah kedudukan dan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 (studi kasus kantor camat pallangga kabupaten gowa)? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-*breakdown* ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) bagaimana kedudukan dan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014? 2) Faktor apa sajakah yang mempengaruhi kepemimpinan camat dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewangnya menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014?

Jenis penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yuridis empiris, adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi wawancara, Dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun secara sekunder, lalu kemudian teknik pengolahan dan analisa data yang dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan dan peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Camat menerima pelimpahan sebagai wewenang Bupati/ Walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah (kewenangan delegatif), Camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. (Kewenangan atributif). Kecamatan di bentuk sebagai pelaksana asas desentralisasi.

1. Implikasi dari penelitian ini adalah:1) Perlu ditingkatkan lagi peran dan kinerja kecamatan Pallangga yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 2). Pemerintah Kecamatan Pallangga harusnya lebih meningkatkan lagi program-program yang dapat membantu dan mensejahterkan masyarakat di Kecamatan Pallangga.3) Pemerintah dan masyarakat agar bisa saling bersinergi untuk memperoleh pemerintahan di Kecamatan Pallangga yang baik.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang Masalah*

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kemudian sekarang Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, (Jakarta: Apollo Lestari), h. 18

peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Perubahan paradigmatis penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2), huruf f sebagai berikut:

(2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;

---

<sup>2</sup>Azmanirah Mardatillah, "Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa", *Skripsi* (Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2013).h. 20

c. Inspektorat;

d. Dinas;

e. Badan; dan

f. Kecamatan.<sup>3</sup>

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

(1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

(3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali kota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan<sup>4</sup>.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai

---

<sup>3</sup>Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

<sup>4</sup>Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 225 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi camat. Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Al Anbiya/24: 72

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya:

*Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.*<sup>5</sup>

Seperti dikemukakan di atas, ayat ini memiliki arti “Dan kami jadikan mereka imam-imam yang memimpin dengan perintah kami.”(pangkal ayat 73). “dan kami wahyukan kepada mereka itu perbuatan-perbuatan yang baik,” yang akan ditiru diteladan, dicontoh dan diikuti oleh ummat yang telah mempercayai pimpinan mereka. “Dan mendirikan sembahyang,” untuk memperkuat perhubungan dengan Allah dan mempertebal iman. “Dan mengeluarkan zakat,” di samping bersembahyang dan menyembah Allah.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Departemen Agama R.I. *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2013), h. 285.

<sup>6</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001), h. 74

Setelah ayat yang lalu menjelaskan tentang kesalahan pribadi mereka, kini ayat 73 menjelaskan upaya mereka menyebarluaskan kesalahan itu kepada lingkungan mereka dengan menyatakan: *Dan kami telah menjadikan mereka yang Kami sebut nama-namanya itu sebagai teladan-teladan yang memberi petunjuk kepada masyarakatnya serta mengantar mereka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berdasarkan perintah kami dan kami telah wahyukan kepada mereka pekerjaan kebajikan sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan sempurna, terutama pelaksanaan shalat dengan baik, sempurna dan bersinambung, penunaian zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, dan adalah mereka sejak dahulu dan senantiasa hanya kepada kami saja, tidak kepada siapa pun mereka menjadi pengabdian-pengabdian, yakni orang-orang yang mantap dan tulus pengabdiannya.*<sup>7</sup>

Kami jadikan mereka *para imam* yang menyeru manusia *kepada kebajikan* agama Allah Ta'ala dan kepada segala kebaikan dengan seizin kami. Allah menyebutkan salat dan zakat secara khusus di antara seluruh macam ibadah, karena *salat* merupakan bentuk ibadah yang paling mulia, dan *zakat* merupakan ibadah harta yang paling utama, dan harta merupakan perkara yang tidak bisa dipisahkan dari ruh. Pemanduan kedua ibadah ini merupakan pengagungan terhadap Al-Khaliq dan kasih-sayang terhadap makhluk.<sup>8</sup>

Dari beberapa penjelasan tafsir diatas dapat disimpulkan bahwa ayat ini berbicara pada tataran ideal tentang sosok pemimpin yang akan memberikan

---

<sup>7</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-quran* (Ciputat: Lantera Hati, 2000), h.481

<sup>8</sup>Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maragi dan Terjemah* (Semarang:PT Karya Toha Putra, 2000), h.21-22

dampak kebaikan dalam kehidupan rakyat secara keseluruhan, seperti yang ada pada diri nabi manusia pilihan Allah. Karena secara koleratif, ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat ini dalam konteks menggambarkan para nabi yang memberikan contoh keteladanan dalam membimbing umat ke jalan yang mensejahterakan umat lahir dan batin. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ayat ini merupakan landasan prinsip dalam mencari figur pemimpin ideal yang akan memberi kebaikan dan keberkahan bagi bangsa dimanapun dan kapanpun. Hal ini senada dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, yang di Riwayatkan oleh Imam Bukhari mengenai sosok pemimpin yang ideal.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ، عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ، إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»

Terjemahnya:

*"Abu Nu'aim menceritakan kepada kami berita dari Abu al-Asyhab, al-Hasan berkata , Ubaidillah bin Ziyad menjenguk Ma'qilbin Yasar ketika ia sakit yang menyebabkan kematiannya, maka Ma'qal berkata kepada Ubaidillah Bin Ziyaad," Aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang telah aku dengar dari Rasulullah Saw . aku telah mendengar Nabi SAW bersabda,"Tiada seorang hamba yang diberi amanat rakyat oleh Allah tidak akan merasakan padanya harumnya surga (melainkan tidak mendapat bau surga)".<sup>9</sup>*

Hadits tersebut menjelaskan bahwa dalam pandangan islam, seorang pemimpin adalah orang yang diberi amanat oleh Allah Swt. Untuk memimpin rakyat, yang di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt. Sebagaimana telah di jelaskan di atas dengan demikian, meskipun seorang

<sup>9</sup>Muhammad ibn Ismail Abu Abdillāh Al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min umūri Rasūlillahi Shalla Allah 'alaihi wa sallam wa sananihi wa ayyamihi*. juz 9 (t.t: Dar Thuwq al-Najah, 1422), h. 64.



pemimpin dapat meloloskan diri dari tuntutan rakyatnya, karena ketidakadilannya, misalkan ia tidak akan mampu meloloskan diri dan tuntutan Allah Swt, Kelak di akhirat. Oleh karena itu, seorang pemimpin hendaknya jangan menganggap dirinya sebagai manusia super yang bebas berbuat dan memerintah apa saja kepada rakyatnya. Akan tetapi, sebaliknya, ia harus berusaha memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat.

Kecamatan Pallangga yang merupakan salah satu kecamatan yang terluas di Kabupaten Gowa, menjadi salah satu penyelenggara pemerintah yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai salah satu sub-sistem pemerintah di Indonesia, kecamatan Pallangga yang memiliki visi “terwujudnya Kecamatan Pallangga yang handal dalam pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gowa” mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Sebagai salah satu kecamatan yang terluas di Kabupaten Gowa, tentunya intensitas pelayanan dan dinamika bermasyarakat akan lebih banyak ditemukan di Kecamatan Pallangga ini. Untuk itu, Camat harus mampu melakukan segala tugas, peran, dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam uraian latar belakang tersebut, hal tersebut menarik untuk dikaji bagi penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “*Kedudukan Dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*”.

### ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Fokus pada penelitian ini adalah kedudukan dan peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat sebagai amanat UUD 1945 PASAL 18. Mengingat luasnya cakupan tugas Camat penulis hanya membatasi penelitian dengan konsep pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pallangga dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa pengertian kata dan istilah yang terdapat dalam skripsi ini.

-Kedudukan merupakan tempat kepengurusan pegawai untuk melakukan pekerjaan dan jabatannya.<sup>10</sup>

-Peran adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang camat untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di kecamatan.

-Camat ialah kepala pemerintahan daerah dibawah Bupati/(Wali Kota) yang mengepalai kecamatan.

-Penyelenggaraan ialah proses cara perbuatan menyelenggarakan sistem pemerintahan.

-Pemerintah daerah ialah unsur pemerintah daerah yang bertugas menjalankan pemerintahan daerah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia* (Surabaya: Reality Publisher, 2008), h. 75

<sup>11</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

### ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan camat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi kepemimpinan camat dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?

### ***D. Kajian Pustaka***

Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan maupun dari beberapa buku yang dimana didalamnya terdapat pandangan dari beberapa ahli. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Yasin dengan judul Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Umbolharjo dibidang kesehatan.<sup>12</sup> Skripsi ini lebih memaparkan tentang peranan camat dalam mengkoordinasikan pemerintah kelurahan di kecamatan Umbolharjo dibidang kesehatan dan dalam penelitiannya menyimpulkan peran Camat secara umum dalam mengkoordinasikan pemerintahan terutama dibidang kesehatan di kelurahan-kelurahan di kota Yogyakarta.

---

<sup>12</sup>Muhammad Yamin, "Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Umbolharjo dibidang kesehatan", *skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Skripsi yang berjudul analisis tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang disusun oleh Azmanirah Mardatillah.<sup>13</sup> Dalam skripsi tersebut lebih menitikberatkan tentang tupoksi camat, sedangkan dalam skripsi yang saya susun menitikberatkan tentang kedudukan dan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Mohammad Taufik Makarao dalam bukunya hukum pemerintahan daerah di Indonesia membahas tentang penyelenggara pemerintah, asas penyelenggara pemerintah, hak dan kewajiban daerah, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga perangkat daerah.

Josep Riwukaho dalam bukunya prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia membahas tentang identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah dan juga menguraikan tentang pengertian-pengertian pokok dan perkembangan desentralisasi di Indonesia.

Musanef dalam bukunya sistem pemerintahan di Indonesia membahas tentang peranan dan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga menguraikan tentang perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia.

### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Azmanirah Mardatillah, “Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan diKecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”, *Skripsi* (Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2013).

a. Menjelaskan bagaimana kedudukan Camat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

b. Menjelaskan faktor apa sajakah yang mempengaruhi kepemimpinan Camat dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

## 2. Kegunaan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah di sebutkan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, antara lain:

### 1. Praktis

a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah yang memerlukan informasi tentang kinerja dan faktor-faktor yang menghambat kinerja Camat Pallangga.

b. Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten Gowa, selaku pembuat keputusan, atau para perumus kebijakan, dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kinerja Camat di era reformasi.

### 2. Teoritis

#### a. Mahasiswa

Mengembangkan dan menerapkan ilmu atau teori yang di dapat dari bangku kuliah, dan meningkatkan dan menambah wawasan bagi penulis dalam bidang yang ditekuni;

b.Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja Camat Pallangga Kabupaten Gowa.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### *A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan*

##### *a. Pemerintahan Daerah*

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang terdiri dari beberapa daerah, yang kesemua daerah tersebut merupakan sebuah daerah otonom yang mendapat pengakuan oleh Negara, hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Menurut Marimun, pemerintah dapat di definisikan menjadi dua pengertian yaitu:

1. Pemerintah dalam arti luas adalah segala tugas atau wewenang kekuasaan Negara, apabila kita menggunakan atau mengikuti perimbangan Montesque maka

---

<sup>1</sup>Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cet pertama, (Jakarta: Rineka cipta 2014) h. 288

pemerintah dalam arti luas adalah bidang-bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

2. Pemerintah dalam arti sempit diartikan sebagai tugas atau kewenangan kekuasaan khususnya dalam bidang eksekutif saja.<sup>2</sup>

Kemudian dia juga menjelaskan tentang aparatur Negara, alat-alat pemerintah dalam arti luas dan sempit sebagai berikut :

- a. Pemerintah dalam arti luas menunjukan aparatur Negara, alat-alat perlengkapan Negara seluruhnya sebagai kesatuan yang melaksanakan seluruh kekuasaan Negara atau pemerintah dalam arti sempit.
- b. Pemerintah dalam arti sempit menunjukan pada organisasi atau perlengkapan yang melaksanakan tugas pemerintah dalam arti sempit.

Sedangkan menurut Mashuri Maschab sendiri yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah suatu aparatur Negara yang berwenang memerintah kesatuan masyarakat, hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan negara. Jadi yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah organisasi yang memiliki hak, kewajiban dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah di daerahnya.<sup>3</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan

---

<sup>2</sup> Mashuri Maschab, *Pemerintah di Daerah*, (Yogyakarta: FISIP UGM, 1974), mengutip pendapat dari Marium h. 32

<sup>3</sup> Victor M.situmorang dan Cormetyna S, *Ilmu pemerintahan* , (Yogyakarta: Fak Sospol UGM, 1976), h. 24



pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahannya dengan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Asas desentralisasi ini dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, yakni penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagian hak dengan obyek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah ditangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan objek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, namun masih tetap dalam kerangka NKRI.
2. Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Asas tugas pembantuan, adalah penguasaan dari pemerintah kepada daerah kota dan atau desa; dari pemerintahan provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota

dan atau desa; serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.<sup>4</sup>

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat otonom, maka mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dari aspirasi masyarakat.

Pemaknaan terhadap konsep di atas dapat dianggap sebagai suatu konsekwensi dari pemberian wewenang atau tanggung jawab pemerintah atasan/pusat kepada pemerintah bawahan/daerah yang diikuti pula dengan sumber pembiayaan, dan pada akhirnya disertai juga dengan pengawasan terhadap pelimpahan tanggung jawab tersebut.

Wewenang pembinaan dalam bentuk pembimbingan dan pendampingan serta pengendalian dan pengawasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, menjadi sangat penting guna memberikan jaminan perlindungan kepada warga negara atau masyarakat dari kesewenang-wenangan dan ketidakadilan pemerintah daerah.

---

<sup>4</sup> HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 25.

Dengan demikian, warga negara yang berada di daerah merasa terlindungi dan mempunyai pegangan serta arah yang tepat dalam melakukan aktivitasnya.<sup>5</sup>

### ***b. Pemerintah Kabupaten/Kota***

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan pertimbangan bahwa daerah Kabupaten dan Kota yang lebih langsung berhubungan dengan masyarakat dan mengetahui persis kondisi daerahnya. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemerintah dipegang oleh pemerintah daerah yang terdiri dari : Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya yang bekerja sama dengan DPRD.

Pemerintah kabupaten dan kota dalam menjalankan fungsinya tidak berbeda fungsi pemerintah hanya saja cakupannya lebih kecil, untuk fungsinya mengatur regulasi yaitu fungsi pemerintah dalam membuat peraturan dan mengeluarkan. Yang kedua fungsi Pemberdayaan (*empowerment*) dalam ini yang diutamakan adalah pemberdayaan aparat dan pemerintahnya. Jadi sebelum meningkatkan kemampuan masyarakat disegala bidang kehidupan maka kualitas aparatnya harus ditingkatkan terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Pemerintah daerah merupakan badan organisasi atau aparatur negara yang berwenang mengatur, menyelenggarakan serta menjalankan fungsi pemerintah suatu pemerintah suatu wilayah dalam waktu tertentu. Dalam mengurus rumah tangganya, pemerintah daerahnya mempunyai inisiatif sendiri mempunyai wewenang sendiri untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya atas dasar kebijaksanaan sendiri atau dengan kata lain otonomi daerah.

---

<sup>5</sup> <http://2frameit.blogspot.com/2011/06/konsep-fungsi-pemerintah.html>, di unduh pada tanggal 04-28-2014, jam 05.55 wib.

<sup>6</sup> Owen E Hughes, *Publik manajemen and administration*, (London : Martin press, 1994) h. 88-99.

Daerah yang dibentuk berdasarkan atas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah adalah:

1. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu.
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan kuat dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota.
3. Asas tugas pembantu yang dapat di laksanakan di daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Desa.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya otonomi di Kabupaten dan Kota masih lebih rendah dibandingkan dengan posisi, dan lembaga-lembaga sektoral luput dari koordinasi pimpinan daerah karena lebih mengacau kepada tingkat pusat. Pemerintah daerah (kabupaten) diharapkan memiliki yang didukung dengan konsep-konsep memajukan wilayahnya.

Fungsi pemerintahan daerah berhak mengatur dan mengurus dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan asas desentralisasi yang memiliki pokok-pokok pengertian yaitu:

1. Agar tidak bertumpuknya kekuasaan di satu tangan saja.
2. Mengikut sertakan rakyat dalam pemerintahan dan mendidik rakyat untuk menggunakan hak dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintah.
3. Demi terlaksananya proses demokrasi.
4. Untuk mempercepat pengambilan keputusan yang tepat.
5. Untuk mencapai pemerintahan yang efisiensi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mashuri Maschab, *Pemerintah di Daerah*, (Yogyakarta: FISIP UGM, 1982), h. 43

### c. *Kepala Daerah*

Dari uraian diatas maka tugas yang di emban kepala daerah sangat berat, hal ini karena kepala daerah mempunyai 2 fungsi yaitu : Aparat daerah dan Aparat Pemerintahan Pusat, dari masing-masing fungsi yang di emban oleh Kepala Daerah ini masing-masing mempunyai fungsi tersendiri yaitu sebagai berikut :

1. Menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah daerah.
2. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan.
3. Bersama-sama DPRD membentuk peraturan daerah.
4. Bersama DPRD, kepala daerah menetapkan APBD.

Sama halnya dengan urusan pemerintahan Provinsi, untuk pemerintah Kabupaten/Kota juga memiliki urusan yang bersifat wajib dan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi: perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagaan kerja, fasilitas pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

---

<sup>8</sup> Mariun, *Azas-azas Ilmu Pemerintah*, (Yogyakarta: Seksi Penerbitan UGM, 1979), h. 38

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

*d. Camat*

Seperti diketahui, pentingnya seorang Camat adalah sebagai pemimpin, memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai dengan yang diatur pada pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/Wali Kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.<sup>9</sup>

Yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan Camat, pada penjelasan pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan. Kenyataan yang berlaku sekarang ini banyak Camat yang tidak memenuhi syarat dimaksud diatas.

---

<sup>9</sup> Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tugas Camat diatur pada Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
  - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.

3. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan. Amanat yang sama juga dikemukakan dalam PP No. 19 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.<sup>10</sup>

Lebih lanjut, Permendagri No. 4 Tahun 2010, memuat beberapa pertimbangan bahwa:

Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan. Selanjutnya bahwa, dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang *Kecamatan* Pasal 15 ayat (2)



peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik.<sup>11</sup>

Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, maka pendelegasian kewenangan Bupati/Wali kota kepada Camat dinilai sangat beralasan dilaksanakan, karena dengan adanya tanggung jawab yang luas dan besar diemban oleh Bupati/Wali Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Tidak mungkin Bupati/Wali Kota mampu melaksanakan berbagai urusannya di kecamatan sehingga memerlukan peran camat untuk melaksanakan kebijakan dan program-programnya.<sup>12</sup>

Menurut data dari Direktorat Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri, bahwa dari 483 kabupaten/kota di Indonesia (data Depdagri, Oktober 2005), baru 125 diantaranya yang telah melakukan pendelegasian kewenangan kepada camat. Untuk Kabupaten Gowa tersendiri kebijakan pendelegasian kewenangan kepada camat telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kecamatan.<sup>13</sup>

Selain tugas tersebut diatas Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal ini diatur pada Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut :

---

<sup>11</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang *Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*

<sup>12</sup>Laporan Legitimid Sumbawa Barat dan Bappeda Sumbawa Barat tentang *Studi Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan* Tahun 2011.

<sup>13</sup>Norman Muhdad, dkk, *Panduan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Inovasi Manajemen Pelayanan di Kecamatan*, Cet I, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, 2011). h. 56

1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
2. Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.
3. Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.<sup>14</sup>

Kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati/Wali Kota kepada Camat misalnya kebersihan di Kecamatan, pemadam kebakaran di Kecamatan dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu. Mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut diatas diatur pada Pasal 227 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu : Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

### ***B. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah***

Setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dianggap sudah tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan pengertian tentang otonomi daerah yang terdapat pada pasal 1 ayat (6),(7),(8),(9),(11),(12) yang berbunyi:

(6). Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(7). Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

(8). Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

(9). Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum

(11). Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

(12). Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **a. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom**

Otonomi daerah menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini didukung oleh pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam otonomi daerah ada peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Sedangkan tujuan yang dicapai dalam penyerahan urusan ini antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah-daerah otonom dan wilayah administratif. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>16</sup>

“Daerah dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan dan keamanan nasional dan syarat-syarat lain yang memungkinkan melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab”.<sup>17</sup>

Selanjutnya Sarundajang dalam buku karangan Juniarto Ridwan dan Achmad Sodik yang berjudul Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik mengartikan otonomi daerah merupakan :

- a. Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintahan (pusat) yang diserahkan kepada daerah.

---

<sup>16</sup>HAW.Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 21

<sup>17</sup>Irawan, Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*,(Jakarta:PT Rineka Cipta, 1990), h. 42

- b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya.
- c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
- d. Otonomi daerah tidak membawahi otonomi daerah lain.<sup>18</sup>

Otonomi daerah berbeda dengan kedaulatan karena kedaulatan menyangkut pada kekuasaan tertinggi dalam suatu negara sedangkan otonomi daerah hanya meliputi suatu daerah tertentu dalam suatu negara. Sistem pemerintahan otonomi daerah mempunyai ciri atau batasan sebagai berikut :

- a. Pemerintahan daerah yang berdiri sendiri
- b. Melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan sendiri
- c. Melakukan pengaturan, pengurusan dari hak, wewenang dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya melalui peraturan yang dibentuk oleh daerah itu sendiri
- d. Peraturan yang menjadi landasan hukum urusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang ada di atasnya.

Otonomi Daerah di Indonesia dilaksanakan dalam rangka desentralisasi di bidang pemerintahan. Desentralisasi itu sendiri setidaknya mempunyai tiga tujuan. Pertama, tujuan politik, yakni demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara pada tataran infrastruktur dan suprastruktur politik. Kedua, tujuan

---

<sup>18</sup>Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung : Nuansa, 2009) , h. 110

administrasi, yakni efektivitas dan efisiensi proses-proses administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, transparan serta murah. Ketiga, tujuan sosial ekonomi, yakni meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat.

Adanya otonomi daerah mewujudkan suatu daerah otonom dimana daerah tersebut mempunyai hak untuk mengatur dan menjalankan rumah tangganya sendiri. Indikator suatu daerah otonom melaksanakan urusannya sendiri adalah ia berhak menjalankan urusan yang ruang lingkupnya atau dampaknya hanya di daerahnya saja dan bukan berdampak nasional. Daerah dapat mengatur urusannya kecuali Pertahanan dan Keamanan, Politik Luar Negeri, Peradilan atau Hukum, Agama dan Moneter.<sup>19</sup>

Prinsip pemberian otonomi daerah yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berupa :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, Keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada ekonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang pada daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.

---

<sup>19</sup>HAW. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 24

4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi.

Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.<sup>20</sup>

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislative daerah, baik fungsi legislative, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.

8. Asas tugas pembantuan diberikan dari pemerintah kepada daerah serta dari pemerintah dan daerah kepada desa.

---

<sup>20</sup>HAW. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 26



### C. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.A Waskito, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan atau kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan.<sup>21</sup>

Cheema dan Rondinelli dalam buku *Decentralization in Developing Countries : A Review of Recent Experience* yang dikutip oleh Aggussalim mengatakan bahwa kewenangan lebih tepat diartikan dengan *authority* sedangkan Hans Antlov dalam bukunya *Federation of Intent in Indonesia 1945-1949* menggunakan istilah *power*.

#### a. Kategori pendelegasian kewenangan

Sumber kekuasaan dan wewenang bagi Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kekuasaan dan kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Pembentuk undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terdiri dari tiga bentuk yaitu

---

<sup>21</sup>Agus Salim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2007), h. 95

pelimpahan kewenangan dengan atribusi, pelimpahan kewenangan dengan delegasi dan pelimpahan kewenangan dengan mandat.

#### 1. Teori Pendelegasian Kewenangan dengan Atribusi.

Atribusi atau *attributie* mengandung arti pembagian. Atribusi digambarkan sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri tanpa ditunjuk untuk menjalankan kewenangannya itu. Atribusi kewenangan itu terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak di dahului oleh suatu pasal untuk diatur lebih lanjut.<sup>22</sup>

Menurut H.D Van Wijk yang dikutip oleh Agus Salim menyatakan bahwa kekuasaan atau kewenangan pemerintah bersumber dari *Originale legislator* yang diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan yang bersumber dari pada pembuat undang-undang asli dan *Delegated legislator* yang diartikan sebagai pemberi dan pelimpahan kekuasaan atau kewenangan dari suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri.<sup>23</sup>

#### 2. Teori Pendelegasian Kewenangan dengan Delegasi

Delegasi mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya kekuatan hukum seperti undang-undang atau peraturan hukum lainnya. Dengan adanya delegasi maka ada penyerahan wewenang dari badan

---

<sup>22</sup>Agus Salim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2007), h. 102

<sup>23</sup>Agus Salim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, h.103

pemerintahan atau pejabat pemerintahan yang satu ke badan atau pejabat yang lainnya yang lebih rendah kedudukannya.

Delegasi adalah penyerahan kewenangan oleh organ yang hingga saat itu ditunjuk untuk menjalankannya kepada satu organ lain yang sejak saat itu menjalankan kewenangan yang didelegasikan atas namanya dan menurut pendapatnya sendiri. Atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankannya sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan-kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri. Sedangkan dalam delegasi terjadi penyerahan kewenangan dari pihak yang sendiri memang telah ditunjuk untuk menjalankan kewenangan itu sedangkan pada atribusi terjadi pemberian kewenangan dari pihak sendiri yang tanpa di tunjuk untuk menjalankan kewenangan itu.<sup>24</sup>

### 3. Teori Pendelegasian Kewenangan dengan Mandat

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mandat memiliki arti perintah dan tugas yang diberikan oleh pihak atasan. Menurut Heinrich yang dikutip dalam buku Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum menyatakan bahwa mandat dapat berupa *opdracht* (suruhan) pada suatu alat perlengkapan (organ) untuk melaksanakan kompetensinya sendiri maupun tindakan hukum oleh pemegang suatu wewenang memberikan kuasa penuh (*volmacht*) kepada sesuatu subjek lain untuk melaksanakan kompetensi nama si pemberi mandat. Jadi sipenerima mandat bertindak atas nama orang lain.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Agus Salim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*,(Bogor:Ghalia Indonesia, 2007) h.105

<sup>25</sup>Agus Salim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, h. 106

Pada mandat, tidak ada penciptaan atau penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan. Mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja pada mandat, pemberi mandat tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga dapat memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat sehingga secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari mandat. Selain kepada pegawai bawahan, mandat dapat pula diberikan kepada organ atau pegawai bawahan sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya.<sup>26</sup>

#### **D. Teori Partisipasi**

Secara harfiah, partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris *prtipicipation* yang berarti peran serta. Dalam pengertian yang lebih luas, partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan. Sumarto dalam Sembodo (2006) menjelaskan bahwa partisipasi itu merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar stakeholders sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat deliberatif, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama bisa terjadi.<sup>27</sup> Dengan demikian, partisipasi masyarakat itu mempunyai peran yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>26</sup>Agus Salim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*,(Bogor:Ghalia Indonesia, 2007) h. 107

<sup>27</sup>Moh Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press 2014) h. 143

Conyers menyebutkan terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu: 1) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya proyek pembangunan serta proyek akan gagal, 2) masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tertentu, dan 3) dalam perspektif demokrasi bahwa partisipasi itu merupakan hak masyarakat untuk dapat terlibat dalam pembangunan. Ditegaskan lagi oleh Abe bahwa “peran serta masyarakat itu adalah hak, bukan kewajiban.” Sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi PBB mengenai hak asasi manusia bab 21 bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak untuk berperan serta dalam urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>28</sup>

#### **E. Teori Kepemimpinan**

Terlepas dari sistem pemilihan pemimpin lokal yang beralih ke sistem yang berdasarkan *de jure* dan *de facto*, ada satu titik penting yang perlu kita garisbawahi apapun sistem yang dipakai yang sangat kita harapkan sebagai rakyat yakni lahirnya pemimpin-pemimpin lokal yang berwawasan global, dalam artian mengetahui kondisi apa yang dipimpinnya dan mempunyai pemikiran atau wawasan secara global. Hal ini sangat penting sebagaimana dikatakan dengan lugas oleh seorang jendral dari angkatan udara Amerika Serikat: “ I don’t think you

---

<sup>28</sup>Moh Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press 2014) h. 144

have to be wearing stars on your shoulders or a title to be a leader. Anybody who wants to raise his hand can be a leader any time artinya kepemimpinan sesungguhnya tidak ditentukan oleh pangkat ataupun jabatan seseorang. Kepemimpinan adalah sesuatu yang muncul dari dalam dan merupakan buah dari keputusan seseorang untuk mau menjadi pemimpin, baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi lingkungan pekerjaannya, maupun bagi lingkungan sosial dan bahkan bagi negerinya.<sup>29</sup>

Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Kepemimpinan bukanlah jabatan atau gelar, melainkan sebuah kelahiran dari proses panjang perubahan dalam diri seseorang. Ketika seseorang menemukan visi dan misi hidupnya, ketika terjadi kedamaian dalam diri (inner peace) dan membentuk bangunan yang kokoh, ketika setiap ucapan dan tindakannya mulai memberikan pengaruh kepada lingkungannya, dan ketika keberadaannya mendorong perubahan dalam organisasinya, pada saat itulah seseorang lahir menjadi pemimpin sejati.<sup>30</sup>

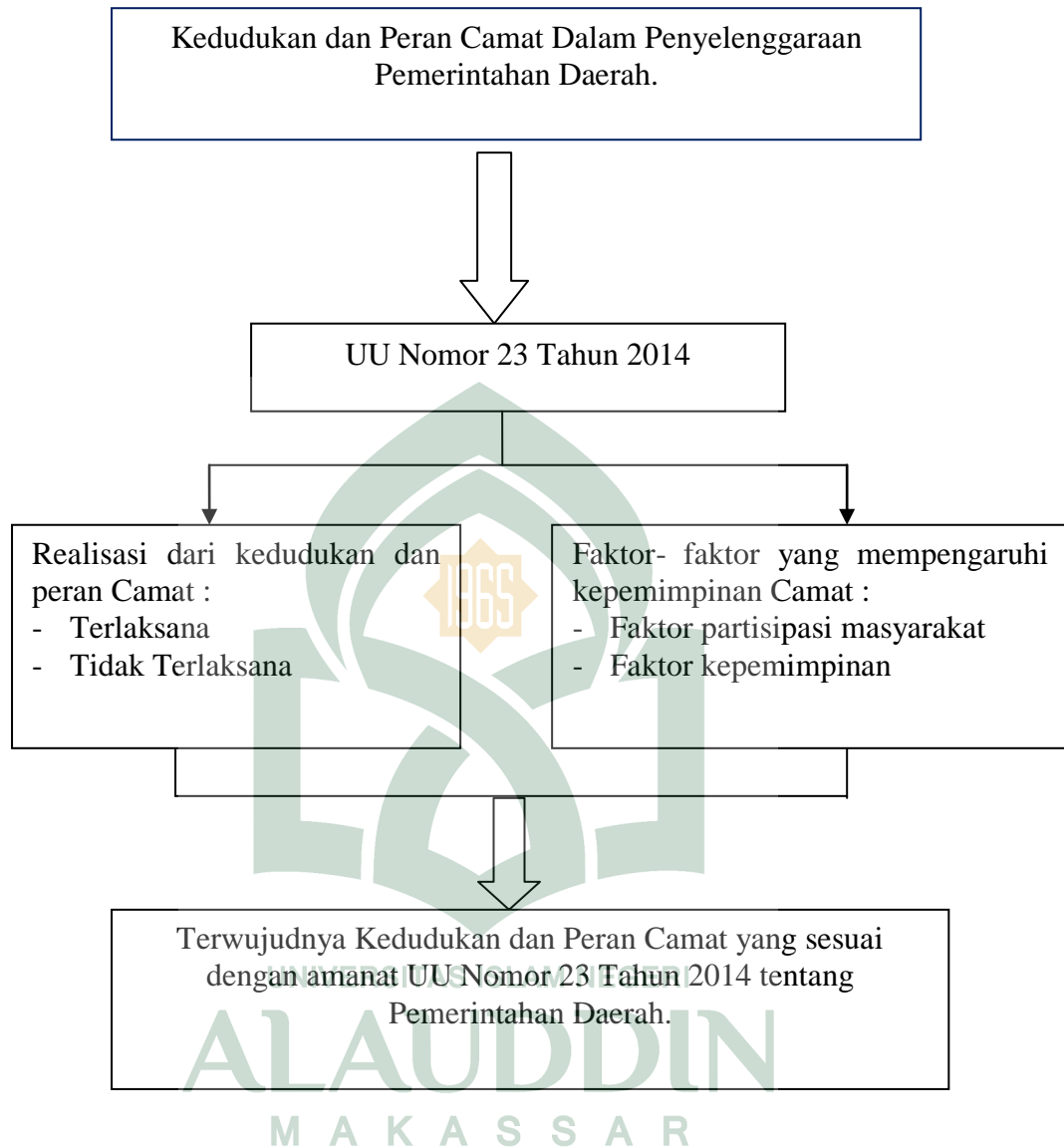
Jadi pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal. Memang sudah saatnya para pemimpin baik dalam tataran lokal maupun nasional sudah saatnya menyadari dan mengimplementasikan makna kepemimpinan dengan sebaik-baiknya karena merekalah yang menjadi tumpuan dan harapan rakyat.

---

<sup>29</sup>Rahman Syah, *Menjawab Harapan Rakyat*, ( Makassar: Media Pustaka Utama, 2010) h.125

<sup>30</sup>Rahman Syah, *Menjawab Harapan Rakyat*, h.126

**F. Kerangka Konseptual.**



### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah di perlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah adalah sebagai berikut:

##### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

###### **1. Jenis Penelitian**

- a. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneltian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan langsung. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada Camat, perangkat kecamatan dan berbagai pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*), penulis mengkaji buku-buku terkait pemerintahan Daerah, situs-situs internet, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2008 serta hal lain yang memiliki hubungan dengan pembahasan skripsi ini.

###### **2. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi Penelitian ini dilakukan di kantor Camat, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Lokasi Penelitian ini di pilih karena, peneliti menganggap lokasi ini dinilai representatif untuk mewakili penelitian ini



dalam mengkaji dan menganalisis lebih jauh bagaimana kedudukan dan peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah .

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Empiris*, yakni penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma yang ada dan mengenai kedudukan dan peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dianalisa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku serta dengan menggunakan kaedah-kaedah hukum yang relevan dengan masalah tersebut.

### **C. Sumber Data**

Dalam menyusun skripsi ini, data yang diperoleh dalam penelitian dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Bahan hukum kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dan pihak yang terkait.
2. Bahan hukum primer merupakan sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
3. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari litelatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumen pada instansi terkait.

4. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus dan ensiklopedia.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Adapun yang di maksud dengan observasi adalah pengamatan dengan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki. Yakni dengan mengamati secara langsung, dan aktivitas yang berlangsung di kantor Camat .

##### **b. Wawancara**

Metode wawancara yang di gunakan penyusun adalah menghubungi dan bertanya( berkomunikasi langsung) dengan responden guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. Pihak yang dimaksud responden dalam penelitian ini adalah Camat, dan pihak-pihak yang terkait lainnya seperti sekretaris kecamatan, perangkat Kecamatan dan masyarakat yang ada disekitar kantor camat di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.<sup>1</sup>

##### **c. Dokumentasi**

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. metode ini di gunakan pada

---

<sup>1</sup> Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Cet V, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 58

saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi anggota yang bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.<sup>2</sup>

#### **E. Instrumen Penelitian**

Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpul data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, yakni: peraturan perundang-undangan, wawancara dan studi dokumen.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Penulis dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata – kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara , catatan, pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorendum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.

#### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Dalam menguji data dan materi yang disajikan, diperlukan metode sebagai berikut:

1. Deduktif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau memperjelaskan bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.

---

<sup>2</sup> Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, h. 73

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Pallangga**

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

##### **a. Keadaan Umum**

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keadaan Kecamatan Pallangga, maka berikut ini penulis akan memberikan gambaran secara singkat mengenai beberapa aspek penting untuk diketahui yaitu keadaan geografis, keadaan demografis dan keadaan pemerintahan Kecamatan Pallangga.

##### **b. Keadaan Geografis**

Kecamatan Pallangga merupakan salah satu dari 16 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gowa. Kecamatan Pallangga secara administratif terbagi menjadi 16 Desa/Kelurahan yaitu: Desa Jenetallasa, Tetebatu, Pallangga, Bungaeja, Panakkukaang, Julukanaya, Julubori, Julupamai, Bontoramba, Kampili, Toddotoa, Parangbanoa, Pangkabinanga, Bontoala, Taeng dan Kelurahan

Manggalli. Adapun luas wilayah Kecamatan Pallangga berdasarkan Desa/Kelurahan yaitu:

No	Desa /Kelurahan	Luas(Km) <sup>2</sup>	Persentase (%)
1.	Jenetallasa	3,22	6,61
2.	Tetebatu	2,43	4,99
3.	Pallangga	4,07	8,36
4.	Bungaeja	3,02	6,20
5.	Panakkukaang	2,15	4,41
6.	Julukanaya	3,08	6,32
7.	Julubori	4,32	8,87
8.	Julupamai	2,71	5,56
9.	Bontoramba	5,09	10,45
10.	Kampili	4,11	8,44
11.	Toddotoa	2,08	4,27
12.	Parangbanoa	4,21	8,64
13.	Pangkabinanga	1,89	3,88
14.	Bontoala	2,33	4,78
15.	Manggali	1,67	3,43
16.	Taeng	2,32	4,76
<b>Jumlah</b>		<b>48,70</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kecamatan Pallangga Dalam Angka 2015

Terlihat bahwa luas wilayah Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yaitu 48,70 Ha. Adapun desa/ kelurahan yang terbesar memiliki luas wilayah terbesar yaitu Desa Bontoramba seluas 5,09 Ha atau sekita 10,45% sedangkan desa/kelurahan yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu Kelurahan Manggalli dengan luas 1,67 Ha atau sekitar 3,43% luas wilayah yang dimiliki oleh daerah tersebut merupakan salah satu modal utama dan faktor pendukung dalam pengembangan pembangunan dari wilayah tersebut. Wilayah yang luas serta di dukung oleh kondisi tanah yang subur menjadi faktor penentu dalam peningkatan produksi sektor pertanian.

Letak Kecamatan Pallangga adalah merupakan salah satu yang terletak dibagian Utara Kecamatan Somba Opu yang :

- Jarak ibu kota Kecamatan : 3 Km
- Waktu Tempu : 15 Menit
- Jarak Ibu Kota Kabupaten : 3 km
- Waktu Tempuh : 30 menit
- Jarak Ibu Kota Provinsi : 15 km
- Waktu Tempuh : ½ Jam

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Pallangga adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Somba Opu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bontomarannu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bajeng
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Barombong.

Berdasarkan kondisi geografis Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa maka sebagian besar kondisi wilayah daerah tersebut adalah dataran. Kondisi ini merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki wilayah tersebut dalam membangun sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan lain sebagainya.

### c. Topografi Kecamatan

Jarak antara ibukota desa/kelurahan dengan ibukota Kecamatan Pallangga cukup bervariasi antara 0 km sampai dengan 11 km. Adapun desa/kelurahan yang memiliki jarak terdekat dengan ibukota kecamatan yaitu Kelurahan Manggalli dengan jarak terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Julupamai dengan ibukota desa/kelurahan yaitu Watu-watu, yaitu jaraknya sekitar 1 jam dari

kecamatan Pallangga. Kecamatan Pallangga secara administratif terbagi atas 16 desa/kelurahan . Daerah ini terletak pada ketinggian antara 0 sampai dengan 499,9 meter diatas permukaan laut.

Kondisi tanah di kecamatan Pallangga terdiri atas 3 jenis yaitu tanah bertekstur batuan dan berwarna merah yang terletak di ujung selatan Dusun Watu-watu yang berbatasan langsung dengan desa Paraikatte Kec. Bajeng, Wilayah ini merupakan wilayah bukit sekitar 15 Ha dengan kedalaman solum sekitar 0 cm-30 cm, Kedua tanah berwarna coklat Keputihan , Liat dan Gembur yang merupakan tanah pada persawahan yang masih subur dengan solum yang dalam. Ketiga tanah berwarna hitam berstektur agak berpasir, tanah ini sebagian besar merupaan tanah pada wilayah ladang sekitar 28 Ha dengan solum yang dalam. Pada tanah berwarna hitam tersebut cocok untuk tanaman jangka panjang dan jangka pendek.

#### **d. Iklim dan curah Hujan**

Secara Umum Kecamatan Pallangga beriklim tropis dimana suhu udara mencapai rata-rata 25<sup>0</sup>C-30<sup>0</sup>C sepanjang tahun dan memiliki dua tipe musim yaitu musim hujan dan musim kemarau antara bulan Mei sampai bulan September. Curah hujan mencapai Rata-rata 2000 mm-3000 mm pertahun dan tertinggi terjadi pada bulan Desember, Januari dan Februari.

#### **e. Keadaan Penduduk**

Jumlah penduduk kecamatan Pallangga sebesar 113.417 yang terdiri dari laki-laki sebesar 55.997 jiwa dan perempuan sebesar 57.420 jiwa dan sekitar 99,45% beragama islam. Beberapa fasilitas umum yang terdapat di Kecamatan Pallangga seperti sarana pendidikan antara lain taman kanak-kanak sebanyak 28

buah, sekolah dasar negeri 13 buah, sekolah dasar inpres 25 buah, sekolah Lanjutan Pertama negeri 5 buah, SLTP swasta 2 buah, SLTA 1 buah, SMK 1 buah, Madrasah Ibtidayah 3 buah, Madrasah Tsanawiyah 3 buah, dan MA 1 buah. Disamping itu terdapat beberapa sarana kesehatan, seperti rumah bersalin 3 buah, Poliklinik 2 buah, Puskesmas 1 buah dan lain-lain. Penduduk kecamatan Pallangga umumnya berprofesi sebagai petani, sedangkan sektor non pertanian terutama bergerak pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.<sup>1</sup>

#### **f. Gambaran Umum Pemerintahan Kecamatan Pallangga**

##### **Visi Misi Kecamatan Pallangga**

- **Visi**

Terwujudnya Kecamatan Pallangga Yang Handal Dalam Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

- **Misi**

- a. Meningkatkan pembinaan kehidupan keagamaan untuk membentuk manusia yang beriman dan berilmu.
- b. Meningkatkan profesional aparat guna mewujudkan sistem pelayanan prima.
- c. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat pembangunan.
- d. Menggali sumber daya sebagai potensi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

---

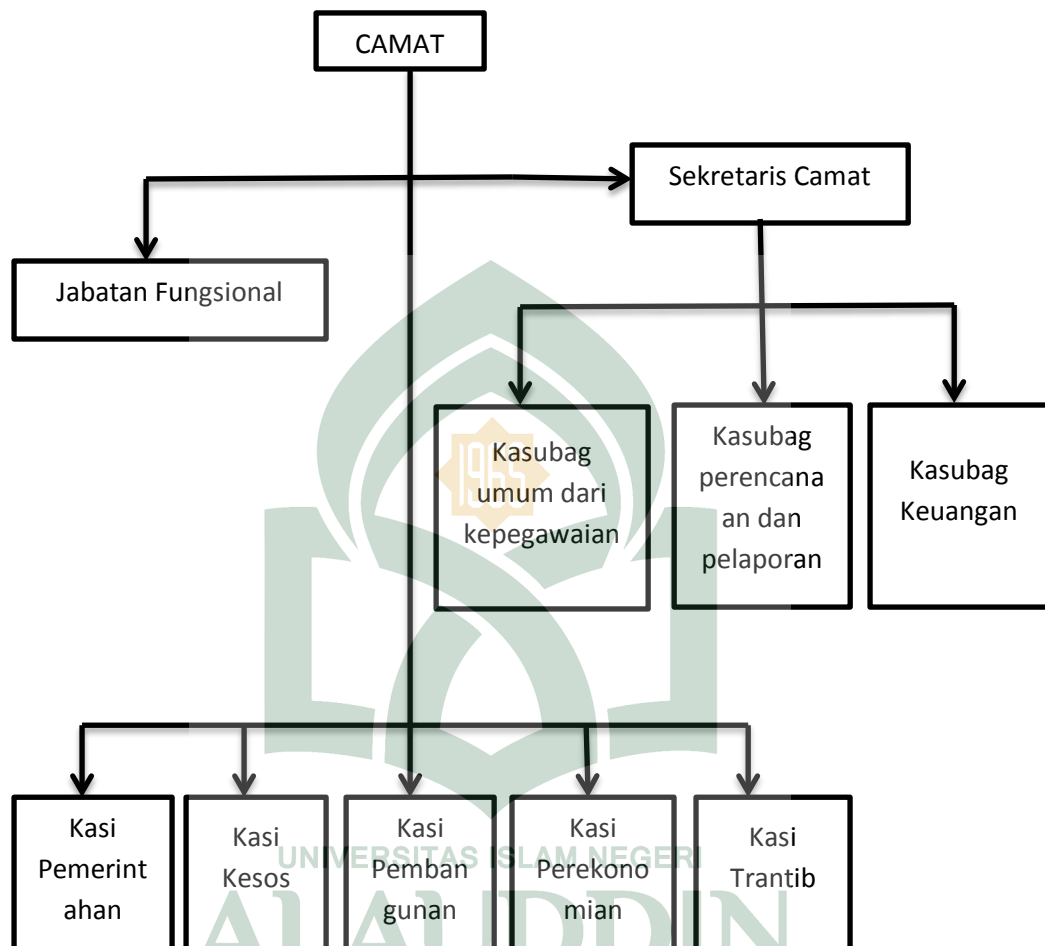
<sup>1</sup>Sumber: Data Sekunder Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, 2015



- e. Menggalang persatuan dan persaudaraan dalam menciptakan ketertiban dan keagamaan.

Hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini adalah temuan penelitian yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi camat khususnya dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kecamatan Pallangga adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa, yang saat ini dipimpin oleh seorang Camat yang bernama Dra.Kamsinah,.M.si yang merupakan Camat yang kesebelas. Kecamatan Pallangga merupakan Kecamatan yang memiliki 16 Kelurahan dan Desa.

Struktur Organisasi Pemerintah  
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa  
( Perda Kab. Gowa Nomor 9 Tahun 2008 )



## **B. Kedudukan dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

### **Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**

#### *A. Kedudukan dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*

##### *Daerah.*

Kecamatan adalah salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai sub-

sistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan. Studi tentang kecamatan di Indonesia telah dilakukan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri, meskipun jumlahnya masih relative terbatas. Beberapa studi yang menonjol misalnya oleh D.D.Fagg Tahun 1958 yang mengkaji camat dengan kantornya. Selain itu terdapat studi lain yang dilakukan oleh Drs Musanef, yang mengkaji organisasi pemerintah kecamatan dengan menitikberatkan pada hubungan camat dengan lurah atau kepala desa. Menurut Drs Musanef kajian tentang kecamatan berarti mencakup tiga lingkungan kerja yaitu:

- a. Kecamatan dalam arti kantor camat;
- b. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang camat sebagai kepalanya;
- c. Camat sebagai bapak “pengetua wilayahnya”.<sup>2</sup>

Seperti roda kehidupan, kedudukan kecamatan juga mengalami pasang naik dan pasang surut, seiring perubahan kebijakan politik pemerintahan yang berlaku sebagai hukum positif. Pada masa Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 dikenal pembagian daerah menurut sifatnya yaitu daerah yang memiliki otonomi atau disebut juga daerah otonom yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi terdiri dari Daerah Otonom Tingkat I dan Daerah Otonom Tingkat II. Selain itu ada pula pembagian wilayah administratif atau juga disebut wilayah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 disebutkan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi dalam

---

<sup>2</sup>Musanef, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 2000), h. 213

tiga tingkatan wilayah administratif yaitu Provinsi atau Ibukota Negara, Kabupaten atau Kotamadya, serta pada tingkatan paling bawah yaitu Kecamatan. Apabila dipandang perlu, antara tingkatan Kabupaten dengan Kecamatan dibentuk Kota Administratif. Menurut Musanef Camat mempunyai kedudukan dan tugas:

- a. Camat mempunyai kedudukan sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota yang bersangkutan.
- b. Dalam hal ditetapkan pejabat pembantu Bupati/Wali kota Camat dalam menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi Bupati/ Wali kota.<sup>3</sup>

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia kembali mengalami perubahan mendasar sejak diberlakukannya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1999. Undang- Undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.

Dalam penjelasan umum Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 dikemukakan bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif. Dengan kata lain daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi dilaksanakan secara meluas di tingkat provinsi dan secara terbatas di tingkat kabupaten/ kota, terutama untuk kewenangan yang mutlak berada di tangan pemerintah pusat. Model ini oleh B.C.Smith dinamakan sebagai “Fused Model”. Daerah kabupaten/ kota merupakan daerah otonom semata yang dibentuk

---

<sup>3</sup>Musanef, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 2000), h. 211

berdasarkan asas desentralisasi, dan menurut Smith model ini dinamakan “Split Model”. Karena asas dekonsentrasi urusan pemerintahan khusus, diluar dekonsentrasi urusan pemerintahan umum berhenti sampai di tingkat provinsi, maka kecamatan menurutnya tidak lagi menjalankan urusan dekonsentrasi. Kecamatan bukan lagi merupakan wilayah administratif melainkan wilayah kerja perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

Berbeda dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974, kedudukan kecamatan menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota (Pasal 66 ayat (1)), dan kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Dari kedua defenisi mengenai kecamatan di atas dapat diinventarisasi perbedaan sebagai berikut:

- a. Kecamatan yang semula merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah kerja. Wilayah kekuasaan menunjukkan adanya yuridikasi kewenangan di dalamnya, sedangkan wilayah kerja lebih merupakan wilayah pelayanan kepada masyarakat.
- b. Kecamatan yang semula dibentuk dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi berubah sebagai pelaksana asas desentralisasi.

Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian dilanjutkan pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/ kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang

Bupati/ Walikota. Di dalam Pasal 209 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa, “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan”.Pasal tersebut menunjukkan adanya tiga perubahan penting yaitu:

- a. Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan.
- b. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja.
- c. Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Pasal 209 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali kota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.<sup>5</sup>

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Lebih lanjut Permendagri No.4 Tahun 2010, memuat beberapa pertimbangan bahwa:

“Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan. Selanjutnya bahwa, dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis

---

<sup>5</sup>Lihat pasal 221 Undang-Undang 23 Tahun 2014

daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik”.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, maka pendelegasian kewenangan bupati/walikota kepada camat dinilai sangat beralasan dilaksanakan, karena dengan adanya tanggung jawab yang luas dan besar diemban oleh Bupati/Walikota untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Tidak mungkin Bupati/Walikota mampu melaksanakan berbagai urusannya di kecamatan sehingga memerlukan peran camat untuk melaksanakan kebijakan dan program-programnya.

Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan camat, membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan oleh camat. Namun demikian ada karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah. Bila ditelaah lebih lanjut, kewenangan camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan instansi dengan lembaga dinas daerah ataupun lembaga teknis daerah yang bersifat spesifik.

Sebagai perangkat daerah, camat memiliki kewenangan delegatif seperti yang dinyatakan dalam Pasal 209 ayat (2) bahwa: “Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi

---

<sup>6</sup>Permendagri No.4 Tahun 2010 tentang kinerja kecamatan.



daerah”. Ini berarti bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Camat merupakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota.<sup>7</sup>

Dengan demikian luas atau terbatasnya pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota sangat tergantung pada keinginan politis dari Bupati/Walikota. Perbandingan Kewenangan Camat sebagai Kepala Wilayah dan Camat sebagai Perangkat Daerah.

Camat sebagai kepala wilayah	Camat sebagai perangkat daerah
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kecamatan merupakan “Wilayah administrasi pemerintahan”.</li> <li>-Camat menerima pelimpahan sebagai wewenang Bupati/Walikota dalam bidang desentralisasi.</li> <li>-Kewenangan yang dijalankan Camat hanya bersifat delegasi dari Bupati/Walikota.</li> <li>-Kecamatan dibentuk dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan merupakan “Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dan kota.</li> <li>Camat menerima pelimpahan sebagai wewenang Bupati/ Walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah (kewenangan delegatif).</li> <li>Camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. (Kewenangan atributif).</li> <li>Kecamatan dibentuk sebagai pelaksana asas desentralisasi.</li> </ul>

<sup>7</sup>Lihat pasal 209 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Tugas umum pemerintahan yang dimaksud dalam pasal 126 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 berbeda maknanya dengan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Menurut Pasal 1 huruf (j) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum adalah: “urusan pemerintahan yang meliputi bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah”. Urusan pemerintahan umum ini diselenggarakan oleh setiap kepala wilayah pada setiap tingkatan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam rangka melaksanakan asas dekonsentrasi.<sup>8</sup>

Tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat tidak dimaksudkan sebagai pengganti urusan pemerintahan umum, karena Camat bukan lagi sebagai kepala wilayah. Selain itu, intinya juga berbeda. Tugas umum pemerintahan sebagai kewenangan atributif mencakup tiga jenis kewenangan yakni kewenangan melakukan koordinasi yang meliputi lima bidang kegiatan, kewenangan melakukan pembinaan serta kewenangan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan koordinasi dan pembinaan merupakan bentuk pelayanan secara tidak langsung (*indirect services*), karena yang dilayani adalah entitas pemerintahan lainnya sebagai pengguna (*users*), meskipun pengguna akhirnya (*end users*) tetap masyarakat. Sedangkan kewenangan pemberian

---

<sup>8</sup>Azmanirah Mardatillah, “Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan diKecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”, *Skripsi* (Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2013).h. 24

pelayanan kepada masyarakat, pengguna (users) maupun pengguna akhirnya (end users) sama yakni masyarakat. Jenis pelayanan ini dapat dikategorikan sebagai pelayanan secara langsung (direct services).

Diberikannya kewenangan atributif bersama-sama kewenangan delegatif kepada Camat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebenarnya merupakan koreksi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada masa Undang-Undang tersebut, Camat hanya memiliki kewenangan delegatif dari Bupati/Walikota tanpa disertai kewenangan atributif. Dalam prakteknya selama Undang-Undang tersebut berlaku, masih banyak Bupati/Walikota yang tidak mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat, entah karena tidak tahu ataupun karena tidak mau tahu, Akibatnya banyak Camat yang tidak mengetahui secara tepat mengenai apa yang menjadi kewenangannya..<sup>9</sup>

Sebagai intitusi publik, keberadaan camat hendaknya dimanfaatkan secara optimal untuk melayani masyarakat. Jangan sampai dana publik yang dikeluarkan untuk membayar gaji PNS dan membiayai fasilitas kantor namun tidak memberi manfaat bagi rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Berikut hasil wawancara dengan Camat Pallangga.

“Dengan perubahan kedudukan kecamatan kami sudah siap menerima semua pendelegasian dari Bupati namun tidak semua pendelegasian kewenangan dari Bupati itu di berikan kepada Camat, tapi kami sudah siap menerima pendelegasian tersebut dan siap untuk bekerja.”<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah (Jakarta:Rajawali Pers, 2010)*, h.277

<sup>10</sup>Kamsinah, (30 Tahun), Camat Pallangga, wawancara, Gowa 16 Februari 2016.

Sedangkan peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan tertuang dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 221 yang menyebutkan tugas dan fungsi camat antara lain:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.<sup>11</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang camat diatur dengan peraturan bupati/ walikota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 menjelaskan Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

A. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun tugas camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

---

<sup>11</sup>Pasal 221 UU Nomor 23 Tahun 2014

1. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan
3. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
4. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang -undangan; dan,
5. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

B. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Tugas ini meliputi:

1. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
2. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan

3. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota.

C. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. melakukan koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang- undangan.
2. melakukan koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
3. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati atau Walikota.

D. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi:

1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
2. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
3. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

E. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi:

1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
3. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
4. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

F. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi:

1. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan
2. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan
3. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah
4. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan
5. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
6. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

G. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan, meliputi:

1. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
2. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya
3. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
4. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
5. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.<sup>12</sup>

PP Nomor 19 Tahun 2008 mengatur secara lebih rinci mengenai tugas dan wewenang Camat, baik untuk kewenangan yang bersifat atributif maupun pedoman untuk kewenangan yang bersifat delegatif. Untuk kewenangan delegatif disusun berdasarkan kriteria Eksternalitas dan Efisiensi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat diatur dengan peraturan Bupati/Walikota. Selain itu, dipaparkan pula tugas pokok dan fungsi camat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa. Berikut hasil wawancara dengan Camat pallangga mengenai peran Camat.

---

<sup>12</sup>Perda Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan .



“Mengenai peran Camat dalam semua tugas koordinasi di kecamatan kami selaku pemerintah kecamatan Pallangga selalu menjalankan tugas dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab dan program kami itu selalu berjalan dengan baik”.<sup>13</sup>

Dari hasil penelitian penulis dapat di simpulkan bahwa terkait dengan fungsi dan peran Camat terhadap jalannya pemerintahan kecamatan yang di laksanakan pemerintah kecamatan sudah cukup baik, dan pemerintah kecamatan pun saat ini masih menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur. Hal tersebut di buktikan, dengan berjalannya semua program kinerja dari kecamatan Pallangga.

### **c. Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan camat dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**

#### **a. Partisipasi Masyarakat**

Musrenbang kecamatan diselenggarakan untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif dari tingkat Desa/Kelurahan dalam satu wilayah kecamatan dengan rencana pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota di kecamatan bersangkutan sehingga dapat menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dibahas ke musrenbang daerah kabupaten/kota. Tentunya forum ini sangat penting bagi masyarakat pada tingkat kecamatan, sebab mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka.

Forum musrenbang yang diselenggarakan di kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dihadiri dari berbagai kalangan, yaitu anggota DPRD Kabupaten Gowa Dapil Pallangga, Tim Musrenbang Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama,

---

<sup>13</sup>Kamsinah, (30 Tahun), Camat Pallangga, *wawancara*, Gowa 16 Februari 2016.

dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Berikut wawancara peran camat dalam mendorong partisipasi masyarakat ini dijelaskan oleh camat Pallangga, Dra Kamsinah, Msi yang mengatakan bahwa:

“Dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat, kami telah membentuk tim musrenbang kecamatan. Tim ini tidak hanya untuk penyelenggaraan kegiatan musrenbang, diupayakan juga partisipasi yang besar dari masyarakat untuk mengikuti musrenbang. Bukan hanya agar persoalan formalitas kegiatan terlaksana, tapi bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasi mereka secara langsung”.<sup>14</sup>

Berikut hasil wawancara dengan sekretaris kecamatan Pallangga terkait dengan tujuan pemberdayaan yaitu:

“Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki”.<sup>15</sup>

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat yang rumahnya berdekatan dengan kantor Camat mengenai partisipasinya dalam menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan Pallangga.

“ kalau ada kegiatan yang dilakukan di kantor Camat adaji pemberitahuan yang diberikan oleh ibu Camat, tapi kalau saya lebih baik saya pergi jualan sayur dari pada menghadiri kegiatan itu”.<sup>16</sup>

Hal yang senada juga disampaikan oleh Gunawan beliau mengatakan:

“ kalau ada acara yang dilaksanakan di kantor camat saya tidak menghadiri acara tersebut karena saya malas dan buang waktu juga, dan hampir semua

---

<sup>14</sup>Kamsinah, (30 Tahun), Camat Pallangga, *wawancara*, Gowa 16 Februari 2016.

<sup>15</sup>H.Kasmah (30 Tahun), Sekretaris Camat Pallangga, *wawancara*, Gowa 16 Februari 2016.

<sup>16</sup>Abdul Ghani, (40 Tahun), masyarakat Pallangga, *wawancara*, Gowa 16 Februari 2016.

masyarakat di sekitar sini rata-rata jarang datang jika ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan.”<sup>17</sup>

Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberhasilan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Namun, masyarakat sendiri lebih mementingkan pekerjaannya dari pada menghadiri acara dari Kecamatan Pallangga ini dibuktikan dengan pekerjaan masyarakat Pallangga sebagian besar terdiri dari petani dan juga pedagang.<sup>18</sup>

#### b. Faktor Kepemimpinan

Pada tingkat kecamatan, kepemimpinan camat adalah hal yang mutlak diperlukan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, mandiri dan mempunyai hubungan emosional yang tinggi. Kepemimpinan camat merupakan hal yang penting yang dibutuhkan oleh setiap tingkatan organisasi dalam mewujudkan tujuan bersama demi kepentingan masyarakat luas, dalam hal ini unit kegiatan pemberdayaan masyarakat. Meski peran camat tidak lagi sebagai kepala wilayah,

<sup>17</sup>Gunawan, (35 Tahun), masyarakat Pallangga, *wawancara*, Gowa 16 Februari 2016.

<sup>18</sup>Muhammad Taufik Makarso dan Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 288

camat tetap harus berusaha untuk mengkoordinasikan segala daya dan upaya dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Pa'nakkukang Saipuddin, S.os mengenai kepemimpinan Camat Pallangga Kabupaten Gowa.

“Berkaitan dengan kemampuan memimpin Camat sebenarnya sudah tidak diragukan lagi. Beliau termasuk tipikal yang aktif baik dalam kegiatan pembangunan kecamatan maupun dalam pelayanan masyarakat. Camat saat ini masih dianggap sebagai pemimpin baik bagi kami penyelenggara pemerintahan maupun bagi masyarakat kecamatan Pallangga pada umumnya”.<sup>19</sup>

Hal yang senada juga disampaikan oleh Lurah Mangngalli mengenai kepemimpinan Camat Pallangga di Kabupaten Gowa, beliau mengatakan:

“Berkaitan dengan kemampuan kepemimpinan Camat Pallangga dalam menjalankan tugasnya sudah tidak diragukan lagi, beliau termasuk orang yang selalu aktif dalam pembangunan di Kecamatan Pallangga maupun dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan pengamatan langsung di lapangan maka dapat dipahami bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Pallangga itu sudah ada, namun partisipasi masyarakat sendirilah yang kurang dalam menghadiri acara yang dijalankan oleh pemerintah di Kecamatan pallangga ini di buktikan dengan pekerjaan masyarakat Pallangga yang sebagian besar terdiri dari petani dan pedagang sayur masyarakat lebih mementingkan pekerjaannya masing-masing dari pada ikut hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Pallangga.

<sup>19</sup>Saipuddin,(41Tahun), Kepala Desa Pa'nakkukang, wawancara,Gowa 18 Februari 2016.

<sup>20</sup>Muh Ramli, (38 Tahun), Lurah Mangngalli ,wawancara, Gowa19 Februari 2016.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian Bab-bab terdahulu, maka penulis mencoba mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan dan peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan.
2. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam menjalankan kepemimpinan camat dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya di antaranya yaitu: Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah membuat masyarakat yang ada di Kecamatan Pallangga cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dalam pemerintahan di Kecamatan Pallangga dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Faktor kepemimpinan camat merupakan hal yang penting yang dibutuhkan oleh setiap tingkatan organisasi dalam mewujudkan tujuan bersama demi kepentingan masyarakat luas, dalam hal ini unit kegiatan pemberdayaan masyarakat. Meski peran camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, camat tetap harus berusaha untuk mengkoordinasikan segala daya dan upaya dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

## B. Implikasi Penelitian

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan implikasi dari penelitian sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan lagi peran dan kinerja kecamatan Pallangga yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Pemerintah Kecamatan Pallangga harusnya lebih meningkatkan lagi program-program yang dapat membantu dan mensejahterkan masyarakat di Kecamatan Pallangga.
3. Pemerintah dan masyarakat agar bisa saling bersinergi untuk memperoleh pemerintahan di Kecamatan Pallangga yang baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung:CV Diponegoro, 2013
- Hughes E Owen, *Publik manajemen and administration*, London : Martin press, 1994
- M situmorang Victor dan Cormetyna S, *Ilmu pemerintahan*,Yogyakarta: Fak Sospol UGM, 1976
- Mariun, *Azas-azas Ilmu Pemerintah*,Yogyakarta: Seksi Penerbitan UGM, 1979
- Maschab Mashuri, *Pemerintah di Daerah*, Yogyakarta: FISIP UGM, 1982
- Muhdad Norman, dkk, *Panduan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Inovasi Manajemaen Pelayanan di Kecamatan*, Cet I, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, 2011
- Musanef, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1985
- Ridwan Juniarso dan Sodik Achmad, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung : Nuansa, 2009
- Reality, Tim, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia* Surabaya: Reality Publisher, 2008
- Riwu Kaho Josef, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia* Cet. X; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Rusdi Muh. *Hadits Tarbawiy*. Cet: II Makassar: Alauddin Press, 2015
- Salim Agus, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cet pertama, jakarta: Rineka cipta 2012
- Soejito Irawan, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990
- Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

## **B. SKRIPSI**

Mardatillah Azmanirah, *“Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa” Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013

Yamin Muhammad, *“Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Umbolharjo dibidang kesehatan”, skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ,2013

## **C. PERATURAN-PERATURAN**

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008.

## **D. Situs Internet**

- <http://2frameit.blogspot.com/2011/06/konsep-fungsi-pemerintah.html>, di unduh pada tanggal 04-28-2014, jam 05.55 wib.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap, Yudianto lahir di Sungguminasa, 06- Juni 1994 merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri yaitu bapak bernama Muh Jufri dan ibu Mustaina. Penulis sekarang bertempat tinggal di Desa Pa'nakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2006 , dan selanjutnya melanjutkan pendidikan di MTS Muhammadiyah Lempangang Panciro dan menyelesaikannya pada tahun 2009, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke SMK Negeri 1 Pallangga dan menyelesaikannya pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2012 Penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2016.

Dengan ketekunan , motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan serta permulaan bagi penelitian lanjutan mengenai kedudukan dan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014.